

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN RASIO KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Heasty Olyvia Tambunan¹, Roma Grecia Simamora², Ruth Natalia Lumban Gaol³,
Renny Maisyarah⁴
heastyolyviatbn@gmail.com¹, rennymaisyarah@ymail.com²
Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Samosir periode 2022-2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis rasio keuangan daerah, yang meliputi rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian dan keserasian belanja. Data yang digunakan bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PAD mengalami peningkatan dan telah melampaui target pada tahun 2024. Tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah, yang menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio efisiensi yang berada di atas 100% menunjukkan bahwa pengelolaan belanja belum sepenuhnya efisien, serta komposisi belanja masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal. Penyajian informasi keuangan telah dilakukan melalui laporan keuangan daerah, namun belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Akuntabilitas menunjukkan peran yang lebih nyata dalam mendukung pencapaian target PAD. Transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan tetapi masih memerlukan perbaikan agar pengelolaan PAD dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Transparansi, Akuntabilitas, Rasio Keuangan Daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze transparency and accountability in the management of Local Own-Source Revenue (PAD) in the Samosir Regency Government for the period 2022–2024. The method used is descriptive quantitative with a regional financial ratio analysis approach, including effectiveness, efficiency, independence, and expenditure harmony ratios. The data used are sourced from the Regional Government Financial Statements (LKPD). The results of the analysis indicate that the effectiveness level of PAD has increased and exceeded the target in 2024. However, the level of regional financial independence remains relatively low, indicating a high dependence on transfer funds from the central government. The efficiency ratio, which is above 100%, shows that expenditure management has not been fully efficient, and the composition of spending is still dominated by operational expenditures rather than capital expenditures. Financial information has been presented through regional financial reports; however, this has not been fully accompanied by improvements in the quality of financial management. Accountability demonstrates a more significant role in supporting the achievement of PAD targets. Transparency and accountability have been implemented but still require improvements to ensure more optimal PAD management.

Keywords: Local Own-Source Revenue, Transparency, Accountability, Regional Financial Ratios

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian suatu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi fiskalnya. Optimalisasi PAD menjadi penting karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan PAD yang efektif dan efisien menjadi tuntutan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik.

Pengelolaan PAD masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini terlihat dari belum

optimalnya pencapaian target pendapatan serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi daerah yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek tata kelola dan pengawasan.

Salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah penerapan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik. Penerapan kedua prinsip ini diyakini mampu mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Untuk menilai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan PAD, diperlukan suatu alat analisis yang dapat mengukur kinerja keuangan daerah secara objektif. Salah satu alat yang digunakan adalah analisis rasio keuangan daerah, yang meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, serta rasio keserasian belanja. Melalui analisis rasio ini, dapat diketahui kinerja keuangan daerah secara lebih terukur.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan rasio keuangan daerah pada Kabupaten Samosir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan data keuangan daerah.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Samosir tahun 2022-2024. Data tersebut dipilih karena relevan dalam menggambarkan kinerja pengelolaan PAD serta tingkat pencapaiannya dalam suatu periode tertentu.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Adapun rasio yang digunakan meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, serta rasio keserasian belanja. Hasil perhitungan rasio tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan daerah. Hasil analisis keuangan tersebut diinterpretasikan dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara terbuka, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Samosir tahun 2022-2024 yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Analisis dilakukan terhadap empat rasio utama, yaitu rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian belanja. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Samosir 2022-2024

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Trasfer (Rp)	Rasio Kemandirian	
--------------	-----------------	------------------------------------	------------------------------	--

				Kriteria
2022	25.231.747.000	323.500.000.000	7,80%	Sangat rendah
2023	28.765.432.000	358.400.000.000	8,02%	Sangat rendah
2024	34.987.654.000	357.500.000.000	9,79%	Sangat rendah

Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Samosir selama periode 2022-2024 menunjukkan nilai yang masih rendah, yaitu sebesar 7,80% pada tahun 2022, 8,02% pada tahun 2023, dan 9,79% pada tahun 2024. Berdasarkan kriteria yang berlaku, nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, terdapat tren peningkatan setiap tahun yang mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan PAD.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mandiri dalam pengelolaan keuangan, sehingga pertanggungjawaban keuangan masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan pusat. Selain itu, rendahnya kontribusi PAD menunjukkan perlunya peningkatan keterbukaan dalam menggali dan melaporkan potensi pendapatan daerah.

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 2. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Samosir 2022-2024

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
2022	33.408.000.000	25.231.747.000	75,55%	Kurang efektif
2023	32.320.000.000	28.765.432.000	88,99%	Cukup efektif
2024	32.100.000.000	34.987.654.000	108,98%	Sangat efektif

Rasio efektivitas PAD Kabupaten Samosir menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode penelitian. Pada tahun 2022 sebesar 75,55% (kurang efektif), meningkat menjadi 88,99% (sangat efektif) pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin mampu merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan. Kinerja terbaik terjadi pada tahun 2024, dimana realisasi PAD melampaui target yang ditentukan.

Pencapaian target PAD yang jelas dan terukur mencerminkan adanya keterbukaan dalam perencanaan dan pelaporan keuangan daerah. Peningkatan efektivitas juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mempertanggungjawabkan target yang telah ditetapkan melalui realisasi yang optimal.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel 3. Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Samosir 2022-2024

Tahun	Total Pendapatan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi	Kriteria
2022	349.800.000.000	347.300.000.000	99,28%	Kurang efisien
2023	387.200.000.000	393.000.000.000	101,47%	Tidak efisien

2024	392.500.000.000	403.600.000.000	102,84%	Tidak efisien
------	-----------------	-----------------	---------	---------------

Rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Samosir menunjukkan kondisi yang kurang baik. Tahun 2022 sebesar 99,28% (kurang efisien), meningkat menjadi 101,47% pada tahun 2023 dan 102,84% pada tahun 2024 (tidak efisien). Nilai rasio yang melebihi 100% menunjukkan bahwa realisasi belanja lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga terjadi defisit anggaran.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran belum optimal. Informasi defisit menunjukkan adanya keterbukaan, namun perlu diikuti yang lebih baik.

4. Rasio Kecerassian Belanja Daerah

Tabel 4. Rasio Kecerassian Belanja Kabupaten Samosir 2022-2024

Tahun	Belanja Operasi (%)	Belanja Modal (%)
2022	62,94%	19,26%
2023	65,37%	18,10%
2024	65,95%	17,71%

Rasio kecerassian belanja daerah menunjukkan bahwa alokasi belanja masih didominasi oleh belanja operasi. Sementara itu, belanja modal mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rutin dibandingkan pembangunan. Hal ini kurang ideal untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Diperlukan perbaikan perencanaan anggaran dan penyajian data belanja sudah cukup terbuka.

5. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan PAD di Kabupaten Samosir

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dianalisis berdasarkan hasil rasio keuangan daerah yang telah diuraikan sebelumnya. Data dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan bahwa informasi mengenai target dan realisasi PAD telah tersedia secara jelas dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan daerah.

Rasio efektivitas PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga melampaui 100% pada tahun 2024. Realisasi pendapatan pada tahun tersebut telah melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Peningkatan tersebut belum diikuti oleh tingkat kemandirian keuangan daerah yang memadai. Rasio kemandirian masih berada pada kategori sangat rendah, yang berarti kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih terbatas dan ketergantungan terhadap dana transfer tetap tinggi.

Rasio efisiensi yang berada di atas 100% menunjukkan bahwa realisasi belanja lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian belanja belum berjalan dengan baik. Komposisi belanja daerah juga masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal, yang mengindikasikan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif.

Pengelolaan PAD di Kabupaten Samosir menunjukkan adanya keterbukaan informasi dan pencapaian target pendapatan, namun belum didukung oleh struktur keuangan daerah yang kuat. Diperlukan upaya peningkatan kontribusi PAD serta pengendalian belanja agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Samosir tahun 2022-2024, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya optimal. Meskipun rasio efektivitas menunjukkan peningkatan hingga

melampaui target pada tahun 2024, tingkat kemandirian daerah masih berada pada kategori sangat rendah, yang menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio efisiensi yang berada di atas 100% menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah belum terkendali dengan baik, dan komposisi belanja masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal.

Transparansi dalam pengelolaan PAD telah terlihat melalui penyajian informasi keuangan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Keterbukaan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas menunjukkan peran yang lebih nyata, terutama dalam pencapaian target PAD yang semakin baik dari tahun ke tahun. Transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dalam pengelolaan PAD, tetapi belum berjalan secara optimal. Peningkatan kinerja PAD masih memerlukan perbaikan pada aspek kemandirian keuangan daerah, efisiensi belanja, serta keseimbangan alokasi anggaran agar lebih mendukung pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Y., Hasibuan, D. S. B., Waruwu, H., Gulo, P. D., & Nurhaliza, S. (2024). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Citra., Anwar, A., & Syachbrani, W. (2024). *Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa*.
- Fitriana, H., & Maulina, I. (2026). *Analisis efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam perspektif akuntansi sektor publik: Studi literatur*.
- Mozin, S. Y., Abdussamad, S. N., & Saputra, I. N. A. (2025). *Peran transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah: Tinjauan systematic literature review*.
- Muslimah, S., Ardiansyah, D. E., & Astuti, R. P. (2025). *Analisis pengawasan pengelolaan keuangan negara terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan desa*.
- Pemerintah Kabupaten Samosir. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022*. Samosir.
- Pemerintah Kabupaten Samosir. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023*. Samosir.
- Pemerintah Kabupaten Samosir. (2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024*. Samosir.
- Ratnasari, B., & Rahmawati, M. I. (2025). *Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa*.
- Safitri, R., & Alfath, T. P. (2025). *Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD): Perspektif sistem keuangan publik nasional*.
- Saputra, D., & Fitriwati, L. (2023). *Analisis transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa X*.